

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG :
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja PD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2019 menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun 2019. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun serta berfungsi sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra PD yang sifatnya lebih operasional.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2019 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang selama bulan Januari 2019 sampai dengan Juni 2019 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan 2019.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

- Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. PeraturanPemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kota Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2013;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2019.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Perubahan Renja PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang adalah;

1. Mengevaluasi terhadap program - program dan kegiatan – kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun berikutnya ;

2. Mengumpulkan rancangan / usulan program - program dan kegiatan - kegiatan dari unit - unit dalam lingkup kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang ;
3. Memilih, memilah dan menelaah rancangan / usulan program - program dan kegiatan - kegiatan dan disusun berdasarkan skala prioritas ;
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD Perubahan tahun 2019 bagi Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kota Malang
5. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistimatika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, hasil evaluasi tahun berkenaan sehingga di butuhkan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
- 1.2. Landasan Hukum : Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat triwulan II Tahun 2019

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II (pada Rancangan Perubahan Renja sampai bulan Mei 2019 dan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja sampai bulan Juni 2019).

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II (sesuai dengan format E.81). Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

XXV.I-8

1. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu mereview capaian Renja membandingkan dengan hasil analisis kebutuhan penambahan anggaran
2. Penjelasan mengenai alasan proses penambahan anggaran dilakukan
3. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah (dituliskan pada catatan penting)
4. Lampiran tabel berikut, Tabel 2.2

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II Tahun 2019

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II (pada Rancangan Perubahan Renja sampai bulan Mei 2019 dan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja sampai bulan Juni 2019).

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II (sesuai dengan format E.81). Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Realisasi pelaksanaan APBD hingga triwulan II (30 Juni) anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2019 sebesar Rp. 1.878.052.923,00 Secara ringkas realisasi pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2019 hingga triwulan II ditunjukkan pada tabel Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang.

1. Realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II yang belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Adapun program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada Renja yang direncanakan sampai dengan Triwulan II adalah :

- a. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
 - 1) Kegiatan Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana

Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III dan IV.

2) Pemantauan untuk pencegahan bencana

Kegiatan ini belum dapat terealisasi sedang dalam proses dan akan dilaksanakan di tribulan III

b. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

1) Pelatihan dan simulasi darurat bencana

Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III dan IV

2) Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana

Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III dan IV

3) Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana

Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III dan IV

4) Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana

Kegiatan ini belum dapat terealisasi dan akan dilaksanakan di tribulan III dan IV

c. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana

1) Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Kegiatan ini masih dalam tahap pengumpulan data dan akan terlaksana di Akhir Tahun

2) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana

Kegiatan ini belum dapat terealisasi, masih dalam proses pengadaan dan akan dilaksanakan di tribulan III.

3) Rekontruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana

Kegiatan ini belum dapat terealisasi, masih dalam proses pengadaan dan akan dilaksanakan di tribulan III.

- 4) Pemulihan social ekonomi budaya dan psikologis pascabencana

Kegiatan ini masih dalam tahap pengumpulan data, Kegiatan Pemulihan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Psikologis Masyarakat Pasca Bencana selanjutnya akan dijadikan dasar Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Berbasis Masyarakat.

- 5) Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat

Kegiatan ini belum dapat terealisasi akan dilaksanakan di tribulan III.

d. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tidak dilaksanakan karena rencana akan pindah gedung kantor baru dan anggaran akan dipergunakan untuk pemeliharaan gedung kantor baru.

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 1) Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan belum dapat terealisasi karena Penetapan Ranperwal dilakukan oleh OPD yang lebih berwenang

2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan;

a. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

- 1) Kegiatan Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana

Tidak tercapainya kegiatan Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana masih dalam tahap pengumpulan data.

2) Pemantauan untuk pencegahan bencana

Tidak tercapainya kegiatan Pemantauan untuk pencegahan bencana disebabkan karena kesalahan target kinerja dan masih dalam proses akan dilaksanakan di triwulan III

b. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

1) Pelatihan dan simulasi darurat bencana

Tidak tercapainya kegiatan Pelatihan dan simulasi darurat bencana disebabkan karena sepanjang triwulan II masih berada dalam fase puncak kejadian bencana, sehingga prioritaskan fokus penanganan darurat bencana.

2) Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana

Tidak tercapainya kegiatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana disebabkan karena di triwulan II karena berdekatan dengan even-even besar perlombaan pada peringatan HKBN, Pemilu, dan masuknya bulan Ramadhan.

3) Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana

Tidak tercapainya kegiatan Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana disebabkan masih surplusnya cadangan logistik yang ada.

4) Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana

Tidak tercapainya kegiatan Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana disebabkan karena tidak adanya hasil assessment kejadian bencana yang terjadi memenuhi syarat dilakukannya kegiatan ini.

c. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

1) Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Tidak tercapainya kegiatan Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

disebabkan masih menganalisis lokasi bencana mana saja yang memenuhi syarat untuk dilakukannya kajian lebih lanjut.

- 2) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana

Tidak tercapainya kegiatan Reabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana disebabkan Penggeseran penyerapan triwulan

- 3) Rekontruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana

Tidak tercapainya kegiatan Rekontruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana disebabkan Penggeseran penyerapan triwulan

- 4) Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana

Tidak tercapainya kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana disebabkan karena masih dalam tahap pengumpulan data.

- 5) Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat

Tidak tercapainya kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat disebabkan masih dalam proses assessment kelompok masyarakat yang memenuhi syarat dalam kegiatan tersebut.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Tidak tercapainya Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor disebabkan karena rencana akan pindah gedung kantor baru dan anggaran akan dipergunakan untuk pemeliharaan gedung kantor baru

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 1) Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota

Tidak tercapainya Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan disebabkan karena Penetapan Ranperwal dilakukan oleh OPD yang lebih berwenang.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – factor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah, maka pada Perubahan Renja tahun 2019 perlu dilakukan:

- 1) Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.
- 2) Dalam penyusunan jadwal kegiatan perlu di perhatikan faktor eksternal.

XXV.II-17

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2019)	Tingkat Pencapaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
				5		6		7		8		9		10		11			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
		Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana			-	5,620,000	1 Paket bahan bangunan, 150 paket sembako, 140 paket family kit, 1 paket pemeliharaan peralatan bencana	359,915,000	-	8,078,600	-	1,740,000					-	9,818,600	0.00%	2.73%									
		Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya			-	12,470,038	1 Sarana Prasarana	133,145,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%									
Rata-rata capaian kinerja (%)																			21.78%	15.63%										
Predikat kinerja																			sangat rendah	sangat rendah										
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana			30%	1,449,718,428	30%	1,465,405,000		57,913,664		105,667,370						163,581,034	11.16%							BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 Dokumen	136,290,000	1 Dokumen	143,745,000	-	19,049,164	-	54,430,000								-	73,479,164	0.00%	51.12%									

XXV.II-22

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2019)		Tingkat Pencapaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/ Ranperwal			1 Dokumen	18,880,000	1 Dokumen	100,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%								
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah			12 Bulan	75,849,000	12 Bulan	100,000,000	3 bulan	3,165,000	3 bulan	2,225,000					6 bulan	5,390,000	50.00%	5.39%								
		Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Renja			-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Draft RENJA	11,785,000	1 Dokumen	21,775,000					1 Dokumen	33,560,000	100.00%	67.12%								
Rata-rata capaian kinerja (%)																			52.08%	19.04%									
Predikat kinerja																			rendah	sangat rendah									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									8,781,405,000	548,675,928	1,329,376,995							1,878,052,923											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																			39.08%	22.92%									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																			sangat rendah	sangat rendah									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana di wilayah Kota Malang; Tingginya antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD.																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Terbatasnya sumber daya manusia di BPBD; Belum maksimalnya koordinasi antar pelaku dalam penanggulangan bencana; Belum maksimalnya penyampaian informasi terkait program kerja BPBD kepada masyarakat.																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana dan melakukan reschedule kegiatan; Memaksimalkan penyampaian informasi terkait program kerja BPBD kepada masyarakat secara formal maupun informal.																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : Melakukan evaluasi internal dan memaksimalkan sinkronisasi serta harmonisasi antar Renja SKPD.																													

yang tidak perlu

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Didalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan BPBD Kota Malang, BPBD melaksanakan tugas-tugas Penanggulangan Bencana dan tugas-tugas Pemerintah sesuai Peran dan Fungsi Instansi Teknis dibidang Kebencanaan. Adapun analisa kebutuhan anggaran disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
ANALISA KEBUTUHAN PERUBAHAN ANGGARAN

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Belanja Langsung				8,781,405,000.00	1.878.052.923.00	Belanja Langsung			9,031,405,000.00		
	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya				2,774,908,000.00	754.996.149.00	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			2,712,690,000.00		
	Penanggulangan Bencana Daerah				6,006,497,000.00	1.123.056.774.00	Penanggulangan Bencana Daerah			6,318,715,000.00		
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				1,519,357,000.00	487,150,840.000	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana			1,519,357,000.00		
		Persentase kejadian bencana pada titik pantau	30%					Persentase kejadian bencana pada titik pantau	30%			
	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	1 dokumen	-	150,000,00 0.00	0.00	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	1 dokumen	150,000,00 0.00	-	
	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	1200 Titik	-	357,500,00 0.00	12,500,000. 00	Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	60 Titik Longsor	236,375,00 0.00	Penghapusan Uang Harian Petugas Pemantau	
		Persentase masyarakat tangguh bencana	5%					Persentase masyarakat tangguh bencana	5%			
	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	900 Orang	600 Orang	200,000,00 0.00	63,315,000. 00	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	1000 Orang	188,000,00 0.00	Penghapusan Uang Harian Peserta Workshop dan Penambahan Kegiatan SMAB	
	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	150 Orang	225 Orang	150,000,00 0.00	22,500,000. 00	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	225 Orang	150,000,00 0.00	-	

XXV.II-25

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	5 kelurahan	5 kelurahan	661,857.00 0.00	388,835.840 .00	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	16 kelurahan	794,982.00 0.00	Penambahan Honor PNS, Uang Lembur, ATK, Bahan Perlengkapan Praktek (Papan Evakuasi), Honorarium Tenaga Ahli Sosialisasi Kelurahan Tangguh, Makanan Minuman, Jasa TPOK 1 bulan	
2	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana				3,021,735,000.00	472,324,900.00	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana			2,821,735,000.00		
		Rata - rata waktu tanggap (respontime) bencana	< 1 Jam					Rata - rata waktu tanggap (respontime) bencana	< 1 Jam			
	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan	480 Orang	-	603.955,000.00	0.00	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan	295 Orang	258,955,000.00	Pengalihan Kegiatan ke 16.02, 16.04 dan Penambahan ATK ke 16.01, 16.02	
	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	31 orang	25 Orang	898,930,000.00	322,900,800.00	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	31 orang	1,070,445,000.00	Penambahan ATK dan Peralihan kegiatan dari 16.01	
	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	4 jenis	2 Jenis	950,790,000.00	139,605,000.00	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	4 jenis	687,405,000.00	Penghapusan Pengadaan Kendaraan Pick Up	
	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	200 Orang	-	75,000,000.00	0.00	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	335 Orang	250,870,000.00	Peralihan kegiatan dari 16.01 dan penambahan ATK	

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%					Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%			
	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	1 paket bahan bangunan, 150 paket sembako, 140 paket family kit, 1 paket pemeliharaan peralatan bencana	-	359,915.00 0.00	9,818,600.0 0	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana	1 paket bahan bangunan, 207 paket sembako, 190 paket family kit, 1 paket pemeliharaan peralatan bencana	420,915.00 0.00	Penambahan Family kit dan sembako	
	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 sarana prasarana	-	133,145.00 0.00	0.00	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 sarana prasarana	133,145.00 0.00	-	
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana				1,465,405,000.00	163,581,034.00	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			1,977,623,000.00		
		Persentase tertanganinya infrastrukturnya rusak pasca bencana	30%					Persentase tertanganinya infrastrukturnya rusak pasca bencana	30%			
	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 dokumen	-	143,745.00 0.00	73,479,164.00	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun	1 dokumen	143,745.00 0.00	-	

XXV.II-27

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	3 pekerjaan fisik	-	374,409.50 0.00	33,354,500.00	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	8 pekerjaan fisik	788,279.50 0.00	Penambahan Honorarium PNS dan Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Dinding Penahan Tanah (Rehabilitasi)	
	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	5 pekerjaan fisik	-	693,250.50 0.00	42,500,000.00	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	7 pekerjaan fisik	791,598.50 0.00	Penambahan Honorarium PNS dan Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Dinding Penahan Tanah (Rekonstruksi)	
		Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana	30%					Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana	30%			
	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun	1 dokumen	-	115,000.00 0.00	4,010,000.00	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun	1 dokumen	115,000.00 0.00	-	
	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	60 KK	-	139,000.00 0.00	10,237,370.00	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	60 KK	139,000.00 0.00	-	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	100%		847,144,000.00	277,186,969.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	100%	759,856,500.00		

XXV.II-28

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	1300 surat	523 surat	60,000.00 0.00	27,602,300.00	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	1300 surat	67,120.00 0.00	Penambahan Uang Lembur PNS, Belanja Jasa TPOK 1 bulan dan Pengadaan Stuktur Organisasi	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12 bulan	5 bulan	85,000.00 0.00	20,396,473.00	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12 bulan	85,000.00 0.00	-	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	100 m2	71,000.00 0.00	32,195,000.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	76,880.00 0.00	Penambahan Jasa TPOK 1 bulan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	8 jenis	5,000.00 0.00	4,775,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	5,000.00 0.00	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	2 jenis	5,000.00 0.00	1,620,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	5,000.00 0.00	-	
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	1.055 Kotak	260 Kotak	50,000.00 0.00	5,150,000.00	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	1.055 Kotak	50,000.00 0.00	-	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	22 kali	506,144.00 0.00	156,273,196.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	399,976.50 0.00	Penghapusan Perjalanan Dinas Luar Negeri	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang	2 orang	65,000.00 0.00	29,175,000.00	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang	70,880.00 0.00	Penambahan Jasa TPOK 1 bulan	
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan/ kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%		1,405,764,00 0.00	378,429,180.00	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan/ kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%	1,677,068,5 00.00		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	5 jenis	2 jenis	75,000.00 0.00	23,300,000.00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	6 jenis	76,500.00 0.00	Penambahan Pengadaan Almari	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	5 Jenis	5 jenis	91,000.00 0.00	84,000,800.00	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	5 Jenis	85,720.80 0.00	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	-	350,000.00 0.00	0.00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	350,000.00 0.00	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	12 unit	12 unit	269,764.00 0.00	89,722,600.00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	15 unit	393,512.70 0.00	Penambahan BBM, Suku Cadang, Variasi Kendaraan dan Jasa TPOK 1 bulan	

XXV.II-29

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	17 jenis	5 jenis	50,000.00 0.00	14,568,500.00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	18 jenis	61,335.00 0.00	Penambahan Uang Lembur dan Pemeliharaan Tenda	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	1 paket sewa tempat, 2 jenis pakaian kerja, 10 jenis barang modal	2 jenis pakaian kerja, 7 jenis barang modal	570,000.00 0.00	166,837,280.00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	1 paket sewa tempat, 2 jenis pakaian kerja, 13 jenis barang modal	710,000.00 0.00	Penambahan 3 jenis barang modal : Tenda tiup, kompresor, gergaji rumput	
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	76		522,000.00 00.00	99,380,000.00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	76	275,765.00 00.00		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 jenis dokumen	5 jenis Dokumen	81,000.00 0.00	4,500,000.00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 jenis dokumen	43,000.00 0.00	Efisiensi Anggaran	
	Penyusunan/ Review Renstra	Jumlah dokumen renstra yang disusun/direview	1 dokumen	1 Draft Renstra	75,000.00 0.00	14,200,000.00	Penyusunan/ Review Renstra	Jumlah dokumen renstra yang disusun/direview	1 dokumen	28,000.00 0.00	Efisiensi Anggaran	
	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	4 dokumen	2 Dokumen	116,000.00 0.00	41,730,000.00	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	4 dokumen	116,000.00 0.00	-	
	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/ Ranperwal	1 dokumen Perwal	-	100,000.00 0.00	0.00	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/ Ranperwal	1 dokumen Perwal	-	Penetapan Ranperwal dilakukan oleh OPD yang lebih berwenang	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah	12 bulan	6 bulan	100,000.00 0.00	5,390,000.00	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah	12 bulan	50,000.00 0.00	Efisiensi Anggaran	
	Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	1 dokumen	50,000.00 0.00	33,560,000.00	Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	38,765.00 0.00	Efisiensi Anggaran	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumberdaya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah yang berwawaskan Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Selain itu pola perencanaan pembangunan tentunya harus menyeimbangkan peran antara perempuan dan laki-laki, oleh karena itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Secara rinci rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2019	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)			Status (Tetap/Berubah /Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi	Kelompok Sasaran
											Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Belanja Langsung			8,781,405,000.00	9,031,405,000.00	250,000.00				
								Urusan Pemerintahan Umum Lainnya			2,774,908,000.00	2,712,690,000.00	(62,218.00)				
								Penanggulangan Bencana Daerah			6,006,497,000.00	6,318,715,000.00	312,218.00				
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	Jumlah kelurahan tangguh dibagi jumlah keseluruhan kelurahan	5 kelurahan	4	5	1	15	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana pada titik pantau	30%	1,519,357,000.00	1,519,357,000.00	-				
				4	5	1	15	1 Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang	1 dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	15	3 Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana	60 Titik Longsor	357,500,000.00	236,375,000.00	(121,125,000.00)	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	15	2 Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana	1000 Orang	200,000,000.00	188,000,000.00	(12,000.00)	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2019	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)			Status (Tetap/Berubah /Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi	Kelompok Sasaran	
											Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				4	5	1	15	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana	225 Orang	150,000,000.00	150,000,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	15	5	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	16 kelurahan	661,857,000.00	794,982,000.00	133,125,000.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai respond time	Jumlah korban yang tertangani sesuai respond time dibagi jumlah seluruh korban dikali 100%	100%	4	5	1	16		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rata - rata waktu tanggap (resptime) bencana	< 1 Jam	3,021,735,000.00	2,821,735,000.00	(200,000,000.00)				
				4	5	1	16	1	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan	295 Orang	603,955,000.00	258,955,000.00	(345,000,000.00)	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	16	2	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	31 orang	898,930,000.00	1,070,445,000.00	171,515,000.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	16	3	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	4 jenis	950,790,000.00	687,405,000.00	(263,385,000.00)	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	16	4	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	335 Orang	75,000,000.00	250,870,000.00	175,870,000.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	

XXV.III-33

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2019	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)			Status (Tetap/Berubah /Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi	Kelompok Sasaran
												Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				4	5	1	16	5	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	359,915,000.00	420,915,000.00	61,000,000.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	16	6	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 sarana prasarana	133,145,000.00	133,145,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
	persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	Jumlah penanganan kejadian pascabencana dibagi seluruh kejadian pascabencana yang seharusnya ditangani dikali 100%	30%	4	5	1	17		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana	30%	1,465,405,000.00	1,977,623,000.00	512,218,000.00				
				4	5	1	17	1	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun	1 dokumen	143,745,000.00	143,745,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	

XXV.III-34

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2019	Kode Program/Kegiatan				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)			Status (Tetap/Berubah /Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi	Kelompok Sasaran	
											Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				4	5	1	17	2	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	8 pekerjaan fisik	374,409,500.00	788,279,500.00	413,870.00 0.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	17	3	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	7 pekerjaan fisik	693,250,500.00	791,598,500.00	98,348.00 0.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
									Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana	30%								
				4	5	1	17	4	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun	1 dokumen	115,000,000.00	115,000,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				4	5	1	17	5	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	60 KK	139,000,000.00	139,000,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	Nilai IKM	83	5	xx	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	100%	847,144,000.00	759,856,500.00	(87,287,500.00)					
				5	xx	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	1300 surat	60,000,000.00	67,120,000.00	7,120.00 0.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12 bulan	85,000,000.00	85,000,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	

XXV.III-35

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2019	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)			Status (Tetap/Berubah /Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi	Kelompok Sasaran
												Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				5	xx	1	1	7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	71,000,000.00	76,880,000.00	5,880.000.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	1	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	5,000,000.00	5,000,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	1	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	5,000,000.00	5,000,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	1.055 Kotak	50,000,000.00	50,000,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	506,144,000.00	399,976,500.00	(106,167,500.00)	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	1	16	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang	65,000,000.00	70,880,000.00	5,880.000.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan/ kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%	1,405,764,000.00	1,677,068,500.00	271,304,500.00				
				5	xx	1	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	6 jenis	75,000,000.00	76,500,000.00	1,500.000.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	5 Jenis	91,000,000.00	85,720,800.00	(5,279.200.00)	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	350,000,000.00	350,000,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	

XXV.III-36

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Indikator Sasaran 2019	Kode Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)			Status (Tetap/Berubah /Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi	Kelompok Sasaran
												Pagu APBD TA 2019	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/Berkurang				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				5	xx	1	2	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	15 unit	269,764,000.00	393,512,700.00	123,748,700.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	2	19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung yang dipelihara	18 jenis	50,000,000.00	61,335,000.00	11,335,000.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	2	31	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	1 paket sewa tempat, 2 jenis pakaian kerja, 17 jenis barang modal	570,000,000.00	710,000,000.00	140,000,000.00	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	76	522,000,000.00	275,765,000.00	(246,235,000.00)				
				5	xx	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 jenis dokumen	81,000,000.00	43,000,000.00	(38,000,000.00)	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	6	11	Penyusunan/ Review Renstra	Jumlah dokumen renstra yang disusun/direview	1 dokumen	75,000,000.00	28,000,000.00	(47,000,000.00)	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	6	2	Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	4 dokumen	116,000,000.00	116,000,000.00	-	TETAP	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	6	14	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/ Ranperwal	1 dokumen Perwal	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	HAPUS	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	6	16	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah	12 bulan	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	
				5	xx	1	6	x	Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	50,000,000.00	38,765,000.00	(11,235,000.00)	BERUBAH	Lain Lain Pendapatan Daerah	Jawa Timur - Kota Malang	

BAB IV

PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program dan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan RPJMD Kota Malang;
- d. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (bottom up) maupun dari stakeholder terkait dan diupayakan dapat baik yang melekat pada anggaran BPBD maupun pada masing-masing dinas/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 KAIIDAH-KAIIDAH PELAKSANAAN

Oleh karena RPJMD Kota Malang merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD merupakan visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang berisikan rencana dan agenda-agenda pembangunan jangka menengah atau selama periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka mengaktualisasikan perencanaan dalam RPJMD tersebut menjadi suatu dokumen perencanaan tahunan berupa penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran

tahunan, maka Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Seluruh Perangkat Daerah Kota Malang berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kota Malang. Sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis Kabupaten sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJMD;
3. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Malang adalah sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Kota Malang, maka Perangkat sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing;
5. Perangkat Daerah merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD berdasarkan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah setiap tahunnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan selanjutnya.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;
2. Meningkatkan/optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak

pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;

3. Meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat, ormas, lembaga usaha (swasta) dan lembaga non pemerintah termasuk perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuhkembangkan masyarakat yang tanggap, tangkas, tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang ada, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai koordinator, motivator dan fasilitator;
4. Peningkatan penguatan kapasitas masyarakat khususnya yang berada pada wilayah/ daerah rawan dan berpotensi bencana, sehingga menjadi masyarakat yang semakin tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi dan menangani bencana, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan segala kemampuan/daya upaya yang ada, baik kapasitas SDM, kelengkapan dan ketersediaan sarana prasarana serta adanya dukungan dana dan partisipasi semua pihak terkait kebencanaan (LSM/ Ormas/ Lembaga Usaha) pada semua tahapan penanggulangan bencana.